

Strategi Pemanfaatan Sumber Daya dalam Gerakan Sosial Perlawanan Komunitas Salingka Gunung Talang terhadap Penetapan Wilayah Kerja Geotermal Gunung Talang-Bukit Kili, Kabupaten Solok, Sumatra Barat

Juli Ishaq Putra¹, Bob Alfiandi¹, Afrizal¹
Sosiologi, FISIP, Universitas Andalas¹

Abstrak

Artikel ini mengidentifikasi upaya-upaya pemanfaatan sumber daya yang dilakukan dalam Gerakan Sosial Perlawanan Komunitas Salingka Gunung Talang terhadap penetapan wilayah kerja pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTPB) atau Geotermal di kawasan Gunung Talang-Bukit Kili, Kabupaten Solok. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dan melibatkan informan yang dipilih melalui teknik *purposive sampling*. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi dan wawancara mendalam. Penelitian menggunakan Teori Mobilisasi Sumber Daya (RMT) dari Anthony Oberschall. Penelitian ini menemukan bahwa untuk menyukseskan gerakan, para pelaku memanfaatkan sumber daya dengan cara (1) membentuk organisasi dan kepemimpinan dalam gerakan, (2) melibatkan pihak luar untuk mendukung gerakan, (3) menghimpun pendanaan, (4) memanfaatkan kapasitas masyarakat dan kesempatan politik, serta (5) membingkai rasa keterancamannya akan kehilangan sumber ekonomis dari lahan yang akan dieksplorasi oleh pihak perusahaan.

Kata Kunci: *Pemanfaatan sumber daya, gerakan sosial perlawanan, komunitas*

Abstract

This article identifies the resource utilization efforts carried out in the Salingka Gunung Talang Community Resistance Social Movement towards the determination of the working area for the development of a Geothermal Power Plant (PLTPB) or Geothermal in the Gunung Talang-Bukit Kili area, Solok Regency. The study used a qualitative approach and involved informants selected through purposive sampling technique. Data was collected by observation and in-depth interviews. This research uses the Resource Mobilization Theory (RMT) from Anthony Oberschall. This study found that to succeed the movement, the actors utilized resources by (1) establishing organization and leadership within the movement, (2) involving outsiders to support the movement, (3) raising funding, (4) utilizing community capacity and political opportunities, and (5) framing the sense of threat of losing the economic resources of the land to be explored by the company.

Keyword: *Utilization of resources, resistance social movements, communities*

PENDAHULUAN

Salah satu implikasi dari pemberlakuan Undang-Undang Otonomi Daerah (Otda) Tahun 2004 adalah keleluasaan pemerintah daerah membuka peluang bagi para investor untuk menanamkan modal di sektor pertambangan energi panas bumi atau geotermal. Salah satu tujuan dibukanya peluang itu adalah meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) yang dapat bersumber dari dana bagi hasil bersama investor, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 11 UU RI Nomor 33 tahun 2004 Tentang Otonomi.

Namun demikian, kerap kali upaya pemaksimalan potensi geotermal dinilai mengenyampingkan dampak negatif dari eksplorasi terhadap kehidupan masyarakat di lokasi eksplorasi berlangsung. Bosman Batubara dalam laporan penelitiannya menyebutkan,

setidaknya ada tiga dampak negatif yang mengancam kehidupan masyarakat akibat eksplorasi geotermal di antaranya, gempa bumi minor, pencemaran air, serta amblesan. (Batubara, 2014 : 2).

Gerakan sosial perlawanan Komunitas Salingka Gunung Talang terhadap penetapan wilayah kerja Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTPB) atau Geotermal Gunung Talang-Bukit Kili di Kecamatan Lembang Jaya, Kabupaten Solok, telah berlangsung sejak September 2017. Dalam hal ini, Komunitas Salingka Gunung Talang menekan pemerintah dan PT Hitay Daya Energi (HDE) selaku perusahaan pengembang asal Turki, agar rencana pembangunan PLTPB di kawasan itu dibatalkan, karena dikhawatirkan berdampak negatif bagi kelangsungan hidup masyarakat yang sebagian besar bergantung pada lahan pertanian. (Ketika Warga di Solok Protes Pembangunan Pembangkit Panas Bumi (Anggreta & Firdaus, 2019).

Meski pemerintah terus meyakinkan bahwa geotermal aman bagi lingkungan, gerakan sosial perlawanan Komunitas Salingka Gunung Talang tetap berlangsung dan memuncak pada Senin 20 November 2017 lewat aksi perusakan satu unit mobil operasional perusahaan milik PT HDE setelah datang ke lokasi rencana pengeboran tambang geotermal, yang dihadang, dibakar, dan digulingkan oleh masyarakat.

Setelah peristiwa pembakaran mobil itu, PT HDE membuat laporan kepada pihak berwajib yang berujung ditetapkannya 12 anggota Komunitas Salingka Gunung Talang sebagai tersangka pelaku perusakan dan pembakaran mobil, di mana dua di antara 12 tersangka itu berstatus sebagai paralegal LBH Padang. Namun, sejauh ini baru tiga orang yang telah menjalani proses persidangan hingga diputus bersalah oleh Pengadilan Negeri (PN) Kotobaru Kabupaten Solok. (terdakwa pembakaran mobil pt hitay divonis 1 tahun, <https://hariansingalang.co.id/>, diakses 17 Oktober 2018)

Meski perlawanan yang digencarkan telah menyebabkan tiga anggota Komunitas Salingka Gunung Talang dijebloskan ke penjara, tak serta merta mengendurkan semangat komunitas untuk meneruskan gerakan perlawanan. Hingga saat ini, PT Hitay Daya Energi belum memulai kembali penelitian untuk melakukan pembangunan geotermal di kawasan Gunung Talang. Sementara itu di lain pihak, vonis satu tahun penjara bagi tiga anggota Komunitas Salingka Gunung Talang itu justru membuat pihak perusahaan kecewa. (pembakaran mobil geothermal, <https://patronnews.co.id/2018/08>, diakses 15 Oktober 2018)

Dalam studi gerakan sosial, gerakan dapat dikelompokkan berdasarkan dimensi sasaran perubahan (*who is changed*) dan dimensi jumlah besarnya (tingkat) perubahan (*how much changed*). Zanden (dalam Sukmana 2016:17-18) mengelompokkan gerakan sosial berdasarkan basis tujuan idiologi ke dalam empat tipe yaitu: *Revolutionary Movements* (Gerakan Revolusi), *Reform Movements* (Gerakan Reformasi), *Resistance Movements* (Gerakan Resistensi), dan *Expressive Movements* (Gerakan Ekspresif).

Berdasarkan pengertian dari Zenden tentang gerakan resistensi, gerakan sosial perlawanan Komunitas Salingka Gunung Talang dapat dilihat sebagai gerakan untuk mencegah suatu perubahan. Dalam hal ini, mencegah berubahnya fungsi lahan seluas 27.000 hektare di Gunung Talang dari yang semula berfungsi sebagai penyangga ketahanan ekologis dan sumber air bagi lahan pertanian, menjadi fungsi eksplorasi sektor pertambangan energi panas bumi.

Dalam studi gerakan sosial, pendekatan Teori Mobilisasi Sumber Daya memiliki fokus perhatian pada proses-proses sosial yang memungkinkan muncul dan berhasilnya suatu gerakan sosial. Pendekatan ini memberikan perhatian besar kepada faktor-faktor ekonomi serta politik, dan kurang memperhatikan faktor-faktor psikologis dari individu dalam gerakan. Menurut Anthony Obershcall yang pertama kali memperkenalkan teori ini, istilah mobilisasi mengacu pada proses pembentukan kerumunan, kelompok, asosiasi, dan organisasi untuk mencapai suatu tujuan kolektif dalam sebuah gerakan. (Sukmana, 2016:155).

Sementara itu, Klandermans (1984: 583) menyatakan, bahwa Teori Mobilisasi Sumber Daya menekankan pada pentingnya faktor-faktor struktural seperti ketersediaan sumber daya untuk kolektivitas dan posisi individu dalam jaringan sosial, serta menekankan

rasionalitas tentang partisipasi dalam suatu gerakan sosial. Dengan demikian Klandersman meyakini, bahwa keputusan individu-individu untuk terlibat dalam gerakan sosial bukanlah konsekuensi dari sifat-sifat psikologis, melainkan sebuah keputusan rasional di mana seseorang mengambil pilihan untuk terlibat setelah mempertimbangkan untung dan rugi dari keikutsertaannya.

Berdasarkan uraian para ahli terhadap teori ini, Oman Sukmana kemudian merumuskan faktor-faktor determinan dalam gerakan sosial berdasarkan pendekatan mobilisasi sumber daya. Di antaranya adalah; (1) Organisasi Gerakan Sosial. (2) Pemimpin dan Kepemimpinan. (3) Sumber Daya dan Mobilisasi Sumber Daya. (4) Jaringan dan Partisipasi. (5) Peluang dan Kapasitas masyarakat.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka artikel ini hendak memaparkan upaya-upaya atau strategi pemanfaatan sumber daya yang dilakukan oleh Komunitas Salingka Gunung Talang dalam menggencarkan gerakan perlawanan terhadap penetapan wilayah kerja Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTPB) atau Geotermal Gunung Talang-Bukit Kili, sehingga tujuan komunitas yang ingin mencegah berubahnya fungsi lahan dan mencegah hilangnya hak atas lahan mereka menuai keberhasilan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini berlangsung selama 11 Bulan dari bulan Mei 2019 sampai dengan bulan April 2020 di Kecamatan Lembang Jaya, Kabupaten Solok, serta di beberapa lokasi di Kota Padang, Sumatra Barat. Data yang terhimpun dari penelitian ini adalah data yang menerangkan strategi-strategi pemanfaatan sumber daya yang dilakukan oleh Komunitas Salingka Gunung Talang dalam Gerakan Sosial Perlawanan terhadap rencana pembangunan geotermal Gunung Talang-Bukit Kili.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam, observasi terlibat, dan studi naskah pemberitaan di media massa, yang kemudian dianalisis sesuai dengan model yang diperkenalkan oleh Miles dan Huberman, yaitu kodifikasi data, kategorisasi data, dan menarik kesimpulan.

Ada pun para informan dalam artikel ini dipilih menggunakan teknik *purposive sampling* dengan kategori umum dari informan tersebut yaitu para anggota Komunitas Salingka Gunung Talang serta pihak-pihak partisipan yang mendukung gerakan perlawanan komunitas terhadap rencana pembangunan PLTPB atau Geotermal Gunung Talang-Bukit Kili.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Teori Mobilisasi Sumber Daya yang diperkenalkan Anthony Obershcall merumuskan bahwa faktor-faktor determinan atau yang mempengaruhi tingkat keberhasilan dalam suatu gerakan sosial di antaranya adalah; (1) Organisasi Gerakan Sosial. (2) Pemimpin dan Kepemimpinan. (3) Sumber Daya dan Mobilisasi Sumber Daya. (4) Jaringan dan Partisipasi. Serta, (5) Peluang dan Kapasitas masyarakat. Dari lima rumusan tersebut, maka diperoleh setidaknya lima strategi pemanfaatan sumber daya yang digunakan Komunitas Salingka Gunung Talang dalam menggencarkan Gerakan Sosial Perlawanan terhadap penetapan wilayah kerja Geotermal Gunung Talang-Bukit Kili, yaitu :

Membentuk Organisasi dan Kepemimpinan di Komunitas Salingka Gunung Talang

Dalam gerakan sosial perlawanan terhadap rencana PLTPB Gunung Talang-Bukit Kili, gerakan berlangsung melalui wadah organisasi yang lebih terstruktur setelah masyarakat mengirim surat pengaduan pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang, tertanggal 3 Juli Tahun 2017. Diskusi antara masyarakat dengan LBH Padang pun menyepakati bahwa gerakan harus berlangsung dalam wadah organisasi yang lebih terencana.

Awalnya, masyarakat bergerak dalam wadah Himpunan Masyarakat Pencinta Alam Gunung Talang (Himapagta). Akan tetapi, setelah tiga aktor utamanya dipenjara dan

sebagian masuk dalam daftar pencarian orang (DPO), masyarakat kemudian kerap tampil di publik dengan nama Komunitas Salingka Gunung Talang. Namun, dalam kebutuhan administrasi surat-menyurat, komunitas tetap menggunakan nama dan cap stempel Himapagta.

Melalui Komunitas Salingka Gunung Talang yang bersifat kolektif kolegial ini, maka tersedialah wadah bagi masyarakat untuk menentang rencana pembangunan PLTPB Gunung Talang-Bukit Kili oleh PT HDE yang mengantongi izin eksplorasi dari pemerintah. Warga meyakini, dengan bergabung dalam satu wadah yang sama dalam menyuarakan penolakan, lambat laun akan bisa menggagalkan upaya pembangunan PLTPB Gunung Talang-Bukit Kili.

Dalam gerakan sosial perlawanan yang digencarkan Komunitas Salingka Gunung Talang, organisasi yang bersifat kolektif kolegial ini tidak menetapkan ketua atau pucuk pimpinan tertentu, akan tetapi tetap ada aktor-aktor utama yang menyandang peran sebagai pemimpin dalam gerakan dan mampu memberikan pengaruh kepada para peserta gerakan.

Melibatkan Dukungan Pihak Luar

Keresahan masyarakat yang tergabung dalam Komunitas Salingka Gunung Talang yang kemudian memunculkan gerakan perlawanan terhadap rencana pembangunan PLTPB Gunung Talang-Bukit Kili mendapat respons dukungan luar biasa dari berbagai kalangan. Rasa khawatir masyarakat akan kehilangan hak atas sumber daya alam yang selama ini menjadi penopangan ekonomi lewat aktivitas pertanian, dipahami para pendukung dari luar atau pihak eksternal sebagai dampak dari ketidakadilan yang dilakukan pemerintah terhadap masyarakat setempat.

LBH Padang sebagai bagian dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menjadi LSM pertama yang menerima pengaduan dari masyarakat Komunitas Salingka Gunung Talang, yang kemudian melakukan pengkajian mendalam atas poin-poin yang dikhawatirkan oleh masyarakat. Pada akhirnya, LBH Padang menyimpulkan bahwa kehadiran PLTPB Gunung Talang-Bukit Kili akan berdampak buruk bagi usaha pertanian masyarakat yang ditopang oleh ketersediaan sumber daya alam, sehingga bagaimana pun usaha masyarakat untuk menolak rencana PLTPB itu sangat layak untuk disokong.

Selain LBH Padang, banyak pihak luar lainnya yang ikut mendukung gerakan Komunitas Salingka Gunung Talang dalam melawan rencana PLTPB Gunung Talang-Bukit Kili. Terutama sekali dari kalangan LSM seperti Walhi Sumbar, Komunitas Gubuk Kopi, Shelter Utara, Nurani Perempuan WCC, dan lain sebagainya. Meski ada pasang surut intensitas dalam memberikan dukungan terhadap gerakan perlawanan masyarakat ini, LSM tersebut tetap satu suara untuk mendukung gerakan masyarakat Talang.

Bukan saja dari kalangan LSM atau aktivis, kalangan mahasiswa juga menaruh perhatian pada perjuangan Komunitas Salingka Gunung Talang dalam menolak rencana PLTPB Gunung Talang. Terutama sekali saat masyarakat melakukan aksi turun ke lapangan untuk menyuarakan penolakan. Baik dalam bentuk aksi demonstrasi di depan gedung pemerintahan atau simbol-simbol daerah, dalam sesi diskusi yang diinisiasi oleh masyarakat mau pun perusahaan, serta dalam bentuk-bentuk aksi lainnya.

Dalam mendukung gerakan perlawanan yang diusung Komunitas Salingka Gunung Talang, kalangan mahasiswa mengaku tidak tampil dengan bendera institusi pendidikan mau pun dengan bendera organisasi kemahasiswaan baik intra mau pun ekstra kampus. Para mahasiswa mengaku hadir dalam gerakan sebagai perwakilan mahasiswa secara umum yang memiliki kepentingan untuk membela keadilan atas ketidakadilan yang dirasakan oleh masyarakat di kawasan Gunung Talang.

Dalam setiap gerakan aksi turun ke lapangan, ratusan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Sumbar memang kerap terlibat. Dukungan mahasiswa utamanya diperoleh setelah mahasiswa tersebut mendapatkan informasi atas dampak buruk yang akan diperoleh masyarakat di kawasan Gunung Talang jika rencana PLTPB Gunung Talang-Bukit Kili terealisasi. Mahasiswa pun ikut turun secara aktif memberikan dukungan setelah mendapatkan informasi atau ajakan dari pihak lain mau pun dari masyarakat sendiri.

Selain mahasiswa, keterlibatan media massa juga tak dapat disangkal turut berperan dalam gerakan sosial perlawanan Komunitas Salingka Gunung Talang terhadap rencana PLTPB Gunung Talang-Bukit Kili. Paling tidak, media massa berperan secara tidak langsung lewat penerbitan berita-berita terkait gerakan yang dilakukan masyarakat, serta menyebarkannya kepada publik yang kemudian menimbulkan reaksi dukungan dari publik terhadap gerakan. Hal itu terbukti jelas saat dilakukan pengecekan terhadap produk berita beberapa media massa lewat bundel media cetak di kantor-kantor berita media cetak di Sumatra Barat, lewat pencarian berita *online* dengan kata kunci geotermal Gunung Talang di *google*, mau pun lewat pencarian berita televisi dengan kata kunci geotermal di *platform youtube.com*.

Pencarian berita *online* di laman *google* yang dilakukan selama penelitian berlangsung menghasilkan setidaknya 700 lebih pemberitaan dari berbagai media *online* seputar gerakan perlawanan Komunitas Salingka Gunung Talang terhadap rencana pembangunan PLTPB Gunung Talang-Bukit Kili. Sementara itu pencarian video berita pada *platform youtube* pada tanggal yang sama menunjukkan hasil setidaknya 250 berita terkait perlawanan komunitas terhadap PLTPB Gunung Talang-Bukit Kili.

Sementara itu, untuk media cetak, berdasarkan keterangan dari informan penelitian disimpulkan, bahwa intensitas pemberitaan seputar PLTPB atau Geotermal Gunung Talang sangat tinggi pada periode 2017 dan 2018. Sebab pada rentang waktu tersebut, gerakan perlawanan Komunitas Salingka Gunung Talang sangat intens terhadap rencana pembangunan PLTPB Gunung Talang-Bukit Kili. Namun demikian, intensitas pemberitaan perlahan berkurang seiring semakin surutnya gerakan yang dilakukan, karena rencana pembangunan PLTPB Gunung Talang-Bukit Kili oleh perusahaan juga menunjukkan progres perlambatan setelah tiga terdakwa kasus pembakaran mobil perusahaan PT Hitay divonis penjara oleh Pengadilan pada Kamis 15 November 2018.

Dukungan juga mengalir dari kalangan akademisi perguruan tinggi, yang bersedia memberikan pemahaman terkait pola pertambangan geotermal dan kemungkinan-kemungkinan yang dapat merugikan masyarakat setempat jika eksplorasi dan produksi tambang telah dilakukan. LBH Padang kerap tampil sebagai perantara dalam diskusi-diskusi seputar geotermal yang melibatkan akademisi, peneliti, serta Komunitas Salingka Gunung Talang.

Menghimpun Pendanaan untuk Gerakan

Sumber daya materi menjadi bagian penting dalam sebuah gerakan, di samping sumber daya manusia. Dalam gerakan perlawanan Komunitas Salingka Gunung Talang terhadap rencana pembangunan PLTPB Gunung Talang-Bukit Kili, keberadaan sumber daya materi juga amat diperlukan. Jika Edwards dan McCarthy menekankan bahwa sumber daya materi dalam bahasa ekonomi adalah kombinasi dari sumber daya fisik dan sumber daya finansial yang meliputi keuangan, hak milik, ruang kantor, peralatan, hingga perbekalan, maka seluruh komponen itu juga dioptimalkan oleh Komunitas Salingka Gunung Talang untuk menyukseskan gerakan perlawanan yang dilakukan. Baik yang bersumber dari peserta dan para aktor lokal dalam gerakan, mau pun yang berasal dari partisipasi pihak luar.

Finansial Lokal

Anggota Komunitas Salingka Gunung Talang menyepakati bahwa gerakan perlawanan atas rencana pembangunan PLTPB Gunung Talang-Bukit Kili adalah upaya mempertahankan sumber daya alam yang selama ini menjadi penopang hidup bagi masyarakat setempat yang notabene sebagian besar beraktivitas di sektor pertanian. Oleh karena itu, disepakati pula bahwa gerakan perlawanan perlu dilakukan meski pun harus mengorbankan fisik dan materi berupa uang dan harta.

Untuk menggelar pertemuan-pertemuan atau melakukan aksi ke lapangan, masyarakat peserta gerakan bahkan bersedia meninggalkan aktivitas ekonomi harian demi suksesnya pelaksanaan strategi-strategi dalam perlawanan. Bahkan, banyak peserta yang

mengaku rela menyumbangkan uang hingga menggadai dan menjual barang-barang yang ada untuk memberikan sokongan dana bagi gerakan.

Selain donasi, masyarakat juga menginisiasi pembukaan lahan pertanian dan perladangan yang digarap secara bersama-sama, dengan keuntungan dari hasil yang dipakai pula secara bersama-sama untuk mendukung gerakan yang dilakukan. Lahan itu kemudian disebut warga sebagai "Ladang Perjuangan", yang menjadi fokus garapan beberapa anggota gerakan yang disepakati oleh organisasi gerakan. Masyarakat menyebut Ladang Perjuangan sebagai sumber dana alternatif yang diinisiasi bersama-sama. Jadi, sumbangan tak semata-mata dalam bentuk donasi uang pribadi. Nantinya, hasil dari Ladang Perjuangan digunakan sebagian untuk kebutuhan penggarap lahan, dan sebagian lainnya dimasukkan ke dalam kas organisasi.

Pendanaan dari Luar

Selain sumber pendanaan lokal, gerakan perlawanan Komunitas Salingka Gunung Talang terhadap rencana pembangunan PLTPB Gunung Talang-Bukit Kili juga tak bisa dilepaskan dari sumbangsih bantuan pendanaan dari pihak luar. Banyak pihak luar yang bersimpati pada perjuangan yang dilakukan oleh organisasi ini, sehingga dengan berbagai cara dan bentuk ikut memberikan bantuan kepada komunitas.

Selain itu, para mahasiswa yang kerap terlibat dalam aksi bersama organisasi Komunitas Salingka Gunung Talang mengaku selalu turun ke lokasi aksi dengan pendanaan sendiri. Baik untuk kebutuhan transportasi mau pun konsumsi. Meski memang beberapa kali mendapat jamuan makan dari warga setempat di kawasan Gunung Talang.

Memanfaatkan Kapasitas Masyarakat dan Peluang Politik

Gerakan Komunitas Salingka Gunung Talang terhadap rencana pembangunan PLTPB Gunung Talang-Bukit Kili didasari rasa khawatir masyarakat di sekitar Gunung Talang atas potensi hilangnya hak akses atas sumber daya alam yang selama ini menopang kehidupan mereka melalui aktivitas pertanian. Padahal, telah sejak lama masyarakat setempat meyakini bahwa sumber daya alam tersebut sebagai hak ulayat nagari yang diperoleh sebagai warisan dari nenek moyang.

Kurnia Warman menyebutkan, bahwa hak ulayat secara sosiologis bagi orang Minangkabau ditujukan untuk menyatakan tanah milik, baik milik pribadi maupun milik bersama. Atas dasar demikian, berbicara mengenai hak ulayat berarti berbicara mengenai tanah beserta dengan seluruh isinya. Walaupun ruang lingkup hak ulayat dalam Hukum Adat Minangkabau meliputi segala sumberdaya alam yang terdapat di atas dan di dalam bumi, namun tanah merupakan penyebutan yang paling lazim. Penyebutan istilah "tanah" seakan-akan dijadikan sebagai representasi dari seluruh sumberdaya agraria yang terdapat di lingkungan masyarakat hukum adatnya (Warman, 2008:189).

Menyimak pengertian tentang hak ulayat bagi masyarakat Minangkabau, maka masyarakat yang tergabung dalam Komunitas Salingka Gunung Talang juga meyakini bahwa tanah seluas 27.000 hektre lebih yang akan menjadi lokasi eksplorasi oleh PT HDE sebagai hak ulayat nagari yang selama ini menjadi penopang hidup lewat aktivitas pertanian, sehingga bagaimana pun caranya wajib dipertahankan dari upaya pengambilan yang secara halus dilakukan dengan alasan pembangunan nasional. Dengan sendirinya, keinginan kuat dalam memiliki dan mempertahankan hak tersebut telah menjadi penyemangat moral bagi anggota gerakan untuk terus menerus melakukan gerakan perlawanan.

Di sisi lain, kesempatan politik menitikberatkan fokus pada faktor-faktor yang memungkinkan suatu gerakan sosial yang digencarkan mencapai keberhasilan. Dengan demikian, bagaimana pun, faktor ekonomi dan politik dinilai akan sangat menentukan keberhasilan gerakan sosial dibanding faktor individual-personal. Gerakan sosial sendiri merupakan produk dari lingkungan sosial politik di sekitarnya. Oleh karenanya gerakan sosial juga mesti mempertimbangkan kesempatan politik untuk dapat mencapai sasaran dari gerakan itu sendiri (Sukmana 2016:191).

Afrizal menuliskan, bahwa berdasarkan catatan Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA), dalam tiga dekade sejak 1970 hingga 2001, telah terjadi sebanyak 1.753 kasus konflik agraria antara penduduk dengan negara atau bisnis di berbagai tempat di Indonesia, di mana sebanyak 20 persen di antaranya adalah protes agraria dari penduduk atau komunitas terhadap perusahaan skala besar. (Ibid:5)

Kapasitas pemahaman masyarakat akan kepemilikan mereka atas tanah ulayat dan kewajiban untuk mempertahankannya, serta terbuka lebarnya kesempatan untuk menggencarkan gerakan sosial di tengah era reformasi yang terbuka, turut dimanfaatkan sebagai landasan Komunitas Salingka Gunung Talang melakukan gerakan perlawanan atas rencana pembangunan PLTPB Gunung Talang-Bukit Kili. Meski demikian, komunitas mengakui bahwa gerakan yang dilakukan senantiasa mempertimbangkan berbagai hal, termasuk aspek keamanan karena gerakan yang dilakukan berpotensi memunculkan respons represif dari pihak perusahaan sebagai perencana pertambangan, serta respons represif dari pemerintah selaku pihak yang berwenang memberi dan mencabut izin atas rencana usaha pertambangan di kawasan Gunung-Talang-Bukit Kili, Kabupaten Solok tersebut.

Memmingkai Rasa Keterancaman

Proses pembingkai, sebagaimana diterangkan Erving Goffman dalam Sukmana (2016:201), adalah proses masyarakat untuk mereproduksi makna, sehingga teori pembingkai kultural sendiri kerap digunakan dalam aktivitas keseharian. Menurut Goffman, teori pembingkai adalah desain bingkai penafsiran yang digunakan individu untuk memahami dunia. Teori ini mengklaim adanya hubungan antara agenda politik dan permasalahan politik yang terjadi, sehingga menjadi suatu hal yang umum ketika berbicara mengenai pembingkai, maka akan ada keterikatannya dengan aktor politik.

Proses pembingkai juga menjadi hal yang amat penting dan diterapkan dalam gerakan perlawanan Komunitas Salingka Gunung Talang terhadap rencana pembangunan PLTPB Gunung Talang-Bukit Kili. Proses pembingkai dirumuskan secara bersama-sama oleh para pelaku gerakan, serta melibatkan peran media massa yang ikut membingkai dan penyebar makna yang hendak disampaikan pelaku gerakan kepada publik. Selain dimaksudkan untuk merawat semangat dalam gerakan, pembingkai juga dilakukan untuk menyebarluaskan gagasan dan keresahan, sehingga berujung makin bertambahnya dukungan, terutama dari pihak luar kepada pelaku gerakan, dan tujuan dari gerakan dapat lebih mudah dicapai.

Berdasarkan informasi yang dirangkum dari para narasumber, setidaknya ada dua tipe pembingkai yang dilakukan untuk menyebarluaskan gagasan dan keresahan pelaku gerakan serta menarik simpati dari banyak kalangan terhadap usaha-usaha yang dilakukan dalam gerakan.

Menyebarkan Narasi Keterancaman

Dalam berbagai kesempatan, pelaku gerakan senantiasa menyampaikan bahwa tujuan utama dari gerakan perlawanan Komunitas Salingka Gunung Talang terhadap rencana pembangunan PLTPB Gunung Talang-Bukit Kili adalah untuk mencegah berubahnya fungsi lahan seluas 27.000 hektare di Gunung Talang dari yang semula berfungsi sebagai penyangga ketahanan ekologis dan sumber air bagi lahan pertanian, menjadi fungsi eksplorasi sektor pertambangan energi panas bumi. Oleh karena itu, penggunaan narasi keterancaman dalam setiap upaya perlawanan dalam gerakan ini menjadi wajib dilakukan untuk menegaskan posisi sikap masyarakat terhadap proyek geotermal di Gunung Talang-Bukit Kili.

Setiap aksi turun ke jalan yang dilakukan, Komunitas Salingka Gunung Talang selalu menyertakan spanduk-spanduk dan pamflet berisi butir-butir tujuan dari penolakan mereka terhadap rencana pembangunan PLTPB Gunung Talang-Bukit Kili. Pada intinya, perjuangan yang dilakukan semata-mata untuk mempertahankan hak atas tanah yang selama ini telah menjadi sumber utama kehidupan dan perekonomian masyarakat.

Selain menyebarkan narasi keterancaman lewat spanduk saat aksi turun ke jalan dilakukan, Komunitas Salingka Gunung Talang juga berupaya menyebarluaskan narasi itu lewat perantara media massa yang melakukan peliputan saat aksi-aksi atau diskusi-diskusi dilakukan. Selain memberikan ruang dan kesempatan wawancara kepada wartawan, bahkan komunitas juga menyebarluaskan rilis pers ke berbagai platform media untuk dikutip dan ditanggapi sebebaskan-bebasnya oleh media massa.

Penyebarluasan Narasi

Pembingkaihan, disebutkan Snow akan dapat membantu membuat suatu peristiwa menjadi memiliki makna yang kemudian akan membimbing dalam bertindak. Selain itu, pembingkaihan tindakan kolektif juga berfungsi untuk menafsirkan dan memberikan pemahaman yang berguna untuk memobilisasi pengikut potensial dan kostituen, menggalang dukungan penonton, serta memobilisasi antagonis. (Sukmana, 2016:203).

Dalam menggencarkan gerakan, Komunitas Salingka Gunung Talang memainkan peran untuk terus menyebarluaskan informasi bahwa kehidupan mereka di ambang kemelaratan jika nantinya PLTPB Gunung Talang-Bukit Kili betul-betul berdiri. Usaha-usaha penyebarluasan informasi itu dibingkai setidaknya dalam dua pembagian kerja.

KESIMPULAN

Berdasarkan temuan yang diperoleh di lapangan, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa dalam Gerakan Sosial Perlawanan terhadap Penetapan Wilayah Kerja PLTPB Gunung Talang-Bukit Kili, Komunitas Salingka Gunung Talang menerapkan setidaknya lima strategi mobilisasi sumber daya. Pertama, komunitas memobilisasi sumber daya manusia dengan cara menghimpunya dalam sebuah organisasi yang bergerak secara terstruktur dan masif melalui kepemimpinan beberapa aktor utama. Kedua, Komunitas Salingka Gunung Talang juga memanfaatkan jaringan dan komunikasi dengan pihak luar untuk memperoleh dukungan atas gerakan yang sedang dilakukan. Dukungan kemudian datang dari berbagai Lembaga Swadaya Masyarakat, kalangan mahasiswa, kalangan akademisi, hingga dukungan tak langsung dari media massa melalui intensitas pemberitaan.

Ketiga, Komunitas Salingka Gunung Talang juga berupaya mengumpulkan pendanaan sebagai mesin penggerak dalam gerakan yang dilakukan. Sumber pendanaan sendiri berasal dari internal komunitas serta dari sumbangan pihak luar. Keempat, dalam menggencarkan gerakan perlawanan terhadap rencana pembangunan geotermal di Gunung Talang, komunitas ini juga melihat dan memanfaatkan kapasitas pemahaman masyarakat terhadap hak mereka atas tanah ulayat yang menjadi lokasi eksplorasi geotermal, serta memanfaatkan terbukanya kesempatan politik untuk menggencarkan aksi-aksi perlawanan secara terbuka. Kelima, dalam menggencarkan gerakan, Komunitas Salingka Gunung Talang terus membingkai rasa keterancaman mereka dan menyebarluaskannya kepada publik lewat aksi-aksi yang dilakukan di lapangan, serta lewat penyebarluasan berita yang dalam hal ini memanfaatkan hubungan yang terjalin dengan media massa.

Setidaknya, lima strategi itulah yang menjadikan gerakan Komunitas Salingka Gunung Talang memiliki tingkat keberlanjutan cukup baik sejak tahun 2017 hingga saat ini. Bahkan, saat ini pun pihak perusahaan PT HDE belum memulai kembali penelitian untuk membuka PLTPB di kawasan Gunung Talang karena besarnya tekanan yang diberikan oleh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal, 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
Afrizal, 2006. *Sosiologi Konflik Agraria*. Padang: Andalas University Press.
Angreta, Dian Kurnia & Firdaus, 2019. *Local Community Tactics to Decline the Mining ; Evidence from West Sumatra, Indonesia*. WESTECH 2018
Bungin, Burhan.(ed). 2015. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

- Batubara, Bosman. 2014. *Dampak Negatif Energi Geothermal Terhadap Lingkungan. Kertas Kerja*
- Creswell, John W. 2010. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Manalu, Dimpos. 2009. *Gerakan Sosial dan Perubahan Kebijakan Publik*. Yogyakarta: UGM PRESS.
- Moleong, Lexy J. 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Poloma, Margaret M. 2010. *Sosiologi Kontemporer*. Terj. Yasogama. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ritzer, George. 2011. *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*. a.b Alimandan. Jakarta : Rajawali Pers.
- Rusmanto, Joni. 2013. *Gerakan Sosial; Sejarah Perkembangan Teori Antara Kekuatan dan Kelemahannya*. Sidoarjo: Zifatama Publishing.
- Scott, John. 2012. *Teori Sosial: Masalah-masalah Pokok Dalam Sosiologi*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Scott, James. 1989a. *Peasant Resistance*. New York: Rmuncck Me Sharpe 22
- Scott, James. 2000b. *Senjatanya Orang-Orang yang Kalah*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Scott, James. 1976c. *The Moral Economy of Peasant*. New Haven: Yale University Press.
- Sukmana, Oman. 2016. *Konsep dan Teori Gerakan Sosial*. Malang: Intrans Publishing.
- Singh, Rajendra. 2010. *Gerakan Sosial Baru*. Surabaya: Resist Book & Komisi HAM-LPPM Universitas Airlangga.
- Wirardi, Gunawan. 2009. *Seluk Beluk Masalah Agraria, Reforma Agraria, dan Penelitian Agraria*. Yogyakarta: STPN Press.
- Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 2004, Sekretariat Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2007. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2007 Tentang Energi. Jakarta
- Republik Indonesia. 2017. Permen ESDM Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik. Jakarta
- Republik Indonesia. 2014. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2014 Panas Bumi. Jakarta